



BUPATI BALANGAN

Paringin, 18 Agustus 2022

Kepada
Yth. Kepala/Pimpinan SKPD
selaku Pengguna Anggaran
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 020/63 /BPBJ/2022

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBDP) TAHUN ANGGARAN 2022

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta turunannya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 22 ayat (2) dan (3) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD), serta Pengumuman RUP dimaksud dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
2. Pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP merupakan bagian dari Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang dimonitor dan dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seluruh SKPD wajib dan segera mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Aplikasi SIRUP setelah

- disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2022 oleh DPRD Kabupaten Balangan;
- b. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Hasil cetak Pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP untuk APBD Tahun Anggaran 2022 dilaporkan kepada Bupati Balangan melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Kepala LPSE) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan paling lambat pada tanggal 10 September 2022;
 - d. Tata Cara Pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP
 - e. mengikuti Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
 - f. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan identifikasi pemaketan pengadaan barang/jasa berupa Metode Pemilihan, Jenis Pengadaan (Penyedia, swakelola, Penyedia dalam swakelola) atau kegiatan non pengadaan;
 - g. SKPD yang mengalami kendala dalam pengguna aplikasi SIRUP dapat menghubungi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui sub Koordinator Pengelolaan LPSE.

Demikian untuk diketahui dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI, S.Ag,M.I.Kom

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN

TAHUN ANGGARAN : 2022

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : sirup.lkpp.go.id.

Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP per 3 Jam Sekali sesuai dengan data Rekap Satker. Untuk info lebih lanjut hubungi helpdesk-pmep@lkpp.go.id atau helpdesk.pmep@gmail.com



Rekap RUP

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah Paket Penyedia	Jumlah Pagu Penyedia	Jumlah Paket Penyedia Dalam Swakelola	Jumlah Pagu Penyedia Dalam Swakelola	Jumlah Kegiatan Swakelola	Jumlah Pagu Swakelola
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	243	8.539.240.120	0	0	103	3.699.448.000
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	130	819.528.000	0	0	115	2.153.040.000
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	127	6.289.794.514	0	0	118	7.747.900.473
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	312	13.206.014.350	0	0	108	6.022.364.000
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	185	3.403.153.100	0	0	158	6.131.965.960
6	BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	61	50.828.870.637	0	0	4	33.435.977.840

7	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	98	6.665.453.300	0	0	328	4.986.781.098
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	125	2.927.723.367	0	0	35	1.206.638.000
9	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	715	52.533.772.862	0	0	532	55.731.887.452
10	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	1378	91.109.053.895	0	0	415	8.579.327.500
11	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	120	11.880.317.300	0	0	70	3.788.817.000
12	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	324	2.792.015.150	0	0	201	4.879.901.480
13	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	2663	361.317.040.543	0	0	412	29.434.454.912

14	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	184	3.783.707.400	0	0	125	3.854.162.000
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	402	35.483.927.082	0	0	299	73.385.201.134
16	DINAS PERHUBUNGAN	155	7.573.245.450	0	0	68	2.301.225.000
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	118	1.604.416.600	0	0	65	2.696.925.000
18	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	313	8.125.530.100	0	0	98	7.699.415.000
19	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	38	1.369.090.550	0	0	92	6.242.598.350
20	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	220	6.159.184.200	0	0	201	8.624.703.600
21	INSPEKTORAT	97	4.351.414.973	0	0	69	3.467.120.000
22	KECAMATAN AWAYAN	62	993.937.000	0	0	10	491.486.000

23	KECAMATAN BATUMANDI	44	884.678.800	0	0	18	559.685.000
24	KECAMATAN HALONG	52	670.072.800	0	0	22	520.275.000
25	KECAMATAN JUAI	55	741.056.000	0	0	33	937.715.000
26	KECAMATAN LAMPIHONG	66	934.399.900	0	0	13	182.769.800
27	KECAMATAN PARINGIN	68	1.377.840.850	0	0	69	2.879.453.580
28	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	83	2.019.448.600	0	0	26	752.411.000
29	KECAMATAN TEBING TINGGI	60	749.721.255	0	0	28	648.359.000
30	SEKRETARIAT DAERAH	531	62.137.973.981	0	0	169	33.758.293.000
31	SEKRETARIAT DPRD	191	17.674.007.724	0	0	51	19.025.527.800
Total		9220	768.945.630.403	0	0	4055	335.825.828.979